

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sampang, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sampang.

Inspektorat Kabupaten Sampang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya birokrasi sehat Kabupaten Sampang.

Inspektorat didalam melaksanakan tugasnya menghadapi berbagai permasalahan yang perlu dibenahi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	1. Tingginya temuan ketidakpatuhan ((kode 01) terhadap peraturan perundang-undangan	1. Akuntabilitas keuangan belum efisien dan efektif 2. Mempertahankan Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Faktor Internal: 1. Lemahnya Sistem pengendalian internal pemerintah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
	<p>yang berdampak kerugian daerah cukup material, temuan SPI (kode 02) dan temuan 3E yakni tidak ekonomis, tidak efisien dan tidak efektif (kode 03)</p> <p>2. Belum optimalnya penyajian laporan keuangan (SKPD) sesuai dengan SAP</p>	<p>(BPK) RI atas Laporan Keuangan</p>	<p>2. Pada saat melakukan kegiatan pengawasan, APIP belum melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Intern terhadap auditi, sehingga proses penyusunan Program Kerja belum mengacu kepada hasil SPI yang disusun oleh auditi</p> <p>3. Terbatasnya jumlah auditor yang memiliki keahlian mereviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan SAP</p> <p>Faktor Eksternal:</p> <p>1. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP hanya 10 dari 42 SKPD</p> <p>2. SPIP belum sepenuhnya dijadikan pedoman pengendalian risiko internal SKPD, sehingga dampak yang dihasilkan belum optimal</p> <p>3. Rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang menyebabkan terjadinya temuan-temuan kode 01,02,03 yang sifatnya berulang-ulang</p> <p>4. Rendahnya pengetahuan SKPD untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP</p>
<p>2.</p>	<p>Instansi pemerintah belum sepenuhnya memberikan fokus pada upaya mewujudkan kinerja dan tidak jelas hasil yang dicapai:</p> <p>1. Tujuan dan sasarannya tidak berorientasi hasil</p> <p>2. Ukuran kinejanya tidak jelas</p> <p>3. Pelaksanaan program dan kegiatan belum ekonomis, efisien dan efektif</p>	<p>Akuntabilitas kinerja belum efisien dan efektif</p>	<p>Faktor Internal:</p> <p>1. Evaluator kurang memahami mengevaluasi SAKIP</p> <p>2. Kegiatan pengawasan belum berfokus pada hasil 3E</p> <p>Faktor Eksternal:</p> <p>1. SKPD belum menerapkan SAKIP secara memadai</p> <p>2. Sistem informasi kinerja belum optimal</p> <p>3. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP).</p>
<p>3.</p>	<p>1. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan</p> <p>2. Pemenuhan rekomendasi tindak lanjut temuan BPK maupun Inspektorat Daerah oleh SKPD cenderung tidak tepat waktu</p>	<p>Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat</p>	<p>Faktor Internal:</p> <p>1. Kurangnya koordinasi dan pengendalian di lingkup bidang Inspektorat Daerah dalam rangka mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat</p> <p>2. Pemantauan tindak lanjut dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama</p>

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			<p>Faktor Eksternal: Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu</p>
4.	Meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan ASN	Apip belum mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan korupsi	<p>Faktor Internal: APIP belum mampu memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko Instansi Pemerintah Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah</p> <p>Faktor Eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Three lines defense belum optimal 2. Rendahnya komitmen SKPD dalam memenuhi kriteria pencegahan korupsi terintegrasi
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum 2. Keterbatasan waktu dan personil yang menangani 	Meningkatnya kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum	<p>Faktor Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM untuk melaksanakan audit khusus dan investigasi 2. Belum optimalnya penanganan kasus/pengaduan masyarakat <p>Faktor Eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dumas yang diadakan belum memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti 2. Pihak APH menuntut penanganan cepat
6.	Belum efektif dan optimalnya peran Inspektorat dalam menjalankan fungsi (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (assurance activities), (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (anti corruption activities); dan (3) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapabilitas APIP di level 3 dengan catatan yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif 2. Kegiatan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra 3. Pelaksanaan pengawasan intern belum sepenuhnya memenuhi standar, prosedur, mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan 4. Profesionalisme dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan 5. Penggunaan TI belum optimal 	<p>Faktor Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan kompetensi dan profesionalitas APIP dibandingkan dengan banyak dan kompleksnya materi pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang dalam proses meningkatkan kinerja dan kualitas APIP sehingga mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu dalam menjalankan peran layanan Pemberian Saran (Advisory Services) pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
	(consulting activities).	digunakan dalam kegiatan pengawasan	2. Sistem dan Prosedur Pengawasan belum memenuhi standar pengawasan 3. Belum menggunakan teknologi informasi dalam mekanisme pengawasan, pengelolaan database dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan 4. APIP belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan juga Teknologi Informasi 5. Kurangnya jumlah APIP dibandingkan dengan obyek pengawasan 6. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang pengawasan Faktor Eksternal: Persentase pemenuhan anggaran Inspektorat dibandingkan dengan kebutuhan anggaran berdasarkan mandatory audit sesuai ketentuan belum dipatuhi

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2019

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik Inspektorat selaku APIP akan berdampak langsung pada kinerja reformasi birokrasi dan upaya pembangunan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap kinerja Inspektorat terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang menjadi watch dog sekarang berfungsi menjadi *quality assurance*. *Quality Assurance* berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan.

Disamping itu terdapat perluasan jenis kegiatan Assurance tidak hanya audit ketaatan tetapi juga mencakup audit kinerja, audit investigasi, reviu, evaluasi, pemantauan dan sebagai compliance office risk management. Pengembangan peran Consulting meliputi asistensi penyusunan LKPD, pendampingan audit BPK, pembimbingan dan konsultasi manajemen risiko, pengendalian intern dan konsultasi pengadaan barang dan jasa Penerapan risk based audit planning termasuk memperhatikan kebutuhan manajemen dalam pengendalian risiko SKPD.

Perluasan peran Inspektorat Daerah kedepan adalah sebagai berikut :

1. Harus mampu menciptakan penguatan terhadap SPI SKPD
2. Harus mampu meningkatkan Kapabilitas APIP sampai ke level optimal
3. Harus mampu mengawal dan mempertahankan perolehan opini WTP
4. Harus mampu menciptakan perbaikan dan perubahan birokrasi
5. Harus mampu memberikan Second Opinion terhadap permasalahan yang menjadi current issues
6. Harus mampu menjadi Quality Assurance bagi SKPD
7. Memperhatikan aduan masyarakat sebagai referensi perbaikan birokrasi
8. Harus mampu menjadi katalisator dalam pencapaian Clean Government & Good Governance

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Selain itu secara tersirat, Inspektorat juga memiliki peran terhadap misi pertama, yaitu **“Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”** dalam konteks bahwa Inspektorat juga turut serta mewujudkan kualitas SDM APiP yang lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih profesional lagi ke depannya.

Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Insektorat Daerah yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan opini WTP 2. Akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah belum efisien dan efektif 3. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat 4. Apip belum mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan korupsi 5. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya Sistem pengendalian internal pemerintah 2. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP). 3. Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu 3. Three lines defense belum optimal 4. Rendahnya komitmen SKPD dalam memenuhi kriteria pencegahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2. Dukungan dari pihak eksternal (Kemempn, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APiP mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan 3. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dari KKN 6. Meningkatnya kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum 7. Kapabilitas APIP di level 3 dengan catatan yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif	korupsi terintegrasi 5. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;	4 Regulasi yang mewajibkan alokasi persentase tertentu dari nilai APBD untuk kegiatan pengawasan

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Itjen Kemendagri:	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di	a). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur b) Skor Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	1. Mempertahankan opini WTP 2. Akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah belum efisien dan efektif 3. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP).	1. Lemahnya Sistem pengendalian internal pemerintah 2. Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat	1 Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan

<p>daerah; a). Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual b.) Meningkatkan kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B</p>	<p>Pemerintah c) Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur d) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) e) Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) f) Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)</p>	<p>4. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat 5. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN 6. Meningkatnya kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum 7. Kapabilitas APIP di level 3 dengan catatan yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif</p>	<p>waktu 3. Three lines defense belum optimal 4. Rendahnya komitmen SKPD dalam memenuhi kriteria pencegahan korupsi terintegrasi 5. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;</p>	<p>KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan 3 Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat 4 Regulasi yang mewajibkan alokasi persentase tertentu dari nilai APBD untuk kegiatan pengawasan</p>
--	---	--	--	---

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2019

Dengan telah ditelaahnya Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Propinsi Jawa Timur Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang akan mensinkronkan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah belum efisien dan efektif
- b. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat
- c. Rendahnya nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP).
- d. Meningkatnya kasus pengaduan masyarakat yang berdampak pada pelanggaran hukum dan pelimpahan kasus dari Aparat Penegak Hukum
- e. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN
- f. Kapabilitas APIP di level 3 dengan catatan yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif